

KONSISTENSI PANTAI GADING MERATIFIKASI “PROTOKOL HARKIN-ENGEL”

Reva Rinanda Siregar

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Consistency Ivory Coast Ratify the "Protocol Harkin-Engel". The trading system of modern cocoa in Ivory Coast which has been controlled by the government has triggered the worst problems affecting children in Ivory Coast. This research aims to identify and analyze the consistency of the Ivory Coast in implementing the Protocol Harkin-Engel in “agro-industrial” sector of cocoa plantation. This research used historical approach, with descriptive-qualitative analysis model, the type of research literature study, as well as the method of data collection is through the analysis of documentaries, books, journals, reports, and Internet sites. To analyze it, writer conducted critical approach with Constructivism theory to manage conflict transformative. The results of this study indicate that: First, the Ivory Coast is not consistent in applying the Harkin-Engel Protocol in “agro-industrial” sector of cocoa plantations. Existing legislation to regulate violence against children, in fact just the rules made by the government of a general nature and is not indicated for the implementation of the Harkin-Engel Protocol. Secondly, lack of clarity and consistency of regulation Harkin-Engel Protocol to firms cocoa in Ivory Coast United States is also the largest loss Ivory Coast as countries that have ratified the Harkin-Engel Protocol.

Abstrak: Konsistensi Pantai Gading Meratifikasi “Protokol Harkin-Engel”. Sistem perdagangan kakao moderen di Pantai Gading yang selama ini di kuasai oleh pemerintah telah memicu berbagai masalah yang berdampak paling buruk bagi anak-anak di Pantai Gading. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa konsistensi Pantai Gading dalam menerapkan Protokol Harkin-Engel di sektor “agro-industri” perkebunan kakaonya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, dengan model analisis deskriptif-kualitatif, jenis penelitian studi kepustakaan, serta metode pengambilan data yaitu melalui analisis dokumenter, buku, jurnal, laporan, dan situs internet. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan pendekatan *critical* dengan teori konstruktivisme untuk mengolah konflik secara transformatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pantai Gading tidak konsisten dalam menerapkan Protokol Harkin-Engel di sektor “agro-industri” perkebunan kakaonya. Peraturan yang ada untuk mengatur kekerasan terhadap anak, pada kenyataannya hanyalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan tidak diindikasikan untuk implemetasi Protokol Harkin-Engel. Kedua, tidak jelasnya peraturan dan konsistensi Protokol Harkin-Engel terhadap perusahaan-perusahaan coklat Amerika Serikat di Pantai Gading juga merupakan kerugian terbesar Pantai Gading sebagai negara yang telah meratifikasi adanya Protokol Harkin-Engel.

Kata Kunci: agro-industri, kakao, konsistensi pemerintah, Pantai Gading, perusahaan multinasional

PENDAHULUAN

Masalah pekerja anak di sektor “agro-industri” perkebunan kakao Afrika Barat mulai menarik perhatian publik pada pertengahan tahun 2000. Pada saat itu, salah satu stasiun televisi Inggris yaitu “*True Vision*” menayangkan sebuah tayangan dokumenter yang menampilkan pekerja anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya di perkebunan kakao Afrika Barat dengan judul “*Slavery: A Global Investigation*”.¹ Pada

Oktober 2000, dokumenter tersebut disiarkan secara luas di *Great Britain*, Amerika Serikat, dan bagian dunia lainnya.

Tayangan dokumenter dan pemberitaan secara intensif yang menyusul dan disiarkan di media-media secara global menimbulkan keresahan pada pihak-pihak yang berkecimpung dalam industri kakao dan pemerintah nasional di wilayah Afrika Barat. Oleh karena itu, para perwakilan industri kakao, berusaha menemukan jalan keluar

¹ Abby Haglage. Fokus: ‘Lawsuit: Your Candy Bar Was Made By Child Slaves’, *The Daily Beast*, 30 September 2015. Tersedia di: <<http://www.thedailybeast.com/articles/2015/09/30/lawsuit-your-candy-bar-was-made-by-child-slaves.html>> [internet] (diakses pada 22 Novem-

ber 2016, pukul. 19.04 Wib). Selengkapnya dapat dilihat pada: K. Bales, B. Woods, & K. Blewett. *Slavery: A Global Investigation*. London, Inggris: True Vision Productions, 2000. Ditayangkan di BBC pada Oktober 2000. Diakses pada <www.freedocumentaries.org/int.php?filmID=192U>

yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK dapat dihitung dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Keterangan Pendidikan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Rokan Hulu sesuai dengan Bupati Peraturan Rokan Hulu Nomor 11 tahun 2012 dalam beberapa hal sudah terlaksana. Misalnya dalam pemanfaatan senjata teknologi dan informasi. Sekolah di Rokan Hulu sekarang banyak digunakan jaringan internet yang cepat yang tentunya akan memudahkan sekolah dalam mengakses informasi yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, upaya untuk meningkatkan jumlah staf pengajar untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun sebenarnya cukup baik, namun upaya ini benar-benar menjadi bumerang bagi pendanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun, ternyata anggaran yang harus memastikan proses pembelajaran dan siswa bebas dari penambahan biaya pendidikan, sebenarnya banyak digunakan untuk membayar Guru Honorer. Penyebab kegagalan dalam kebijakan pendidikan wajib di Rokan Hulu sesuai dengan Perda Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2012 adalah karena anggaran yang masih kurang, Sumber Daya Manusia terutama guru masih kurang, dan kebijakan sekolah yang sering mencegah pelaksanaan dari wajib belajar 12 tahun ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Badjuri dan Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Semarang: UNDIP Press
- Hoogerwerf, Dennis, 2001. *Implementasi Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Keban, T, Yeremias, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- M. Nazir, 2008. *Motode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Mizan
- Riant Nugroho D., 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang Modelmodel Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Syafaruddin, 2008, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*, Yogyakarta: Balairung & Co
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta
- William NDunn, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Winardi, Ahmadi. 2001. *Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta